

SKRIP no. 047/525.S.1/TU.3/2004

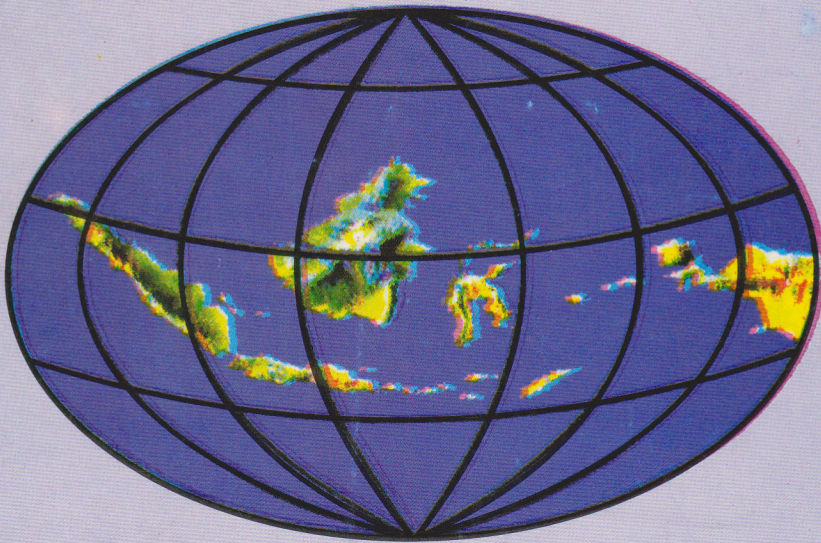
Vol. 4 Nomor 2 Mei 2003

ISSN : 1411 - 5352

Jurnal

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

B/S



Diterbitkan oleh:

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER**

Bekerjasama dengan

DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

ISSN : 1411 - 5352

Jurnal ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Merupakan jurnal ilmiah **terakreditasi** yang memuat artikel ilmiah hasil penelitian atau kajian konseptual/analisis kritis dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial

DEWAN REDAKSI

Ketua Penyunting

Suranto

Wakil Ketua

Sukidin

Penyunting Pelaksana

Dwi Suparno

Sri Kantun

Bambang Hari Purnomo

Sumardi

Djupriyanto

Penyunting Ahli

Simanhadi Widyaprakosa (UNEJ)

Agus Suman (UNIBRAW)

Tjuk Wirawan (UNEJ)

Suhartono (UGM)

Suyanto (UNY)

Mutrofin (LSM)

Pelaksana Tata Usaha

Sutrisna Djaya

Sri Handayani

Nurul Umamah

M. Na'im

Imam Syafi'i

Jurnal ILMU PENGETAHUAN SOSIAL terbit pertama kali pada bulan Januari 2000 sebagai hasil kerjasama Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jember dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jember

ALAMAT REDAKSI

Kampus FKIP Universitas Jember

Jln. Kalimantan III/3 Jember Kotak Pos 162 Tlp/Fax (0331) 334988.

E-mail JAPI-Jurnal@Yahoo.com

Rekening Bank : Suranto No. 030.000541188.920 BNI 46 Cabang Jember

Jurnal ILMU PENGETAHUAN SOSIAL terakreditasi sebagai *Jurnal Ilmiah Nasional* dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 52/DIKTI/Kep/2002 tanggal 12 Nopember 2002

- Pemberdayaan Lembaga Tradisional Masyarakat Daerah Penyangga Hutan Untuk Pelestarian Taman Nasional Meru Betiri
Hari Yuswadi 115-127
- Perkembangan Industri Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur
Asmuji 128-145
- Business Cycle Transmission Between The United States and Indonesia: A Vector Error Correction Model
Ruswiati Suryasaputra 146-157
- Latar Belakang dan Proses Terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tahun 1976
Mohamad Na'im 158-173
- Interaksi Tiga Kekuatan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Nurul Umamah 174-184
- Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural
Mutrofin 185-193
- Peran Pendidikan di Pesantren Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Santri
Mulyadi 194-203
- Menguatnya Mitos Maradindo Sebagai Dampak Tersumbatnya Aspirasi Rakyat Kecil
Ferdinand Kerebungu 204-215
- Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Peralatan Automatisasi pada Industri Pengolahan
Widyono Hadi 216-224
- Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru SMU Negeri di Kabupaten Jember
Andi Sularso 224-235

MULTIKULTURALISME DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Mutrofin

Abstract: Numerous studies have documented the importance of the multicultural education as subject in the social studies curriculum. The article goal is to describe applied possibility of multiculturalism perspective through multicultural education in Indonesia. This analysis views three perspectives on multicultural education, namely, 1) cultural assimilation perspective; 2) cultural pluralism perspective; and 3) cultural synthesis perspective. The studies show that, the available perspective applied in Indonesia is the cultural synthesis perspective that started by providing its content through the learning process in all subjects matter. But it is depend on teachers capabilities.

Kata Kunci: Multikulturalisme, Pendidikan Multikultural

Keprihatinan mendalam terhadap situasi kehidupan berbangsa dan bernegara selama periode 1998-2003 dinilai sudah berada di ambang kerusakan yang sempurna dan menyeluruh sebagaimana diungkapkan banyak para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh seni, akademisi dan para pemikir politik di berbagai media massa. Hal itu bisa dimengerti. Oleh karenanya, siapa pun yang masih mencintai keutuhan bangsa berkewajiban mendukung gerakan moral secara bersama-sama guna menyelamatkan keadaan. Namun penting dimengerti bahwa gerakan moral saja tidaklah cukup guna mengatasi carut marut persoalan bangsa tanpa ada solusi jangka panjang yang permanen.

Carut marut yang paling mengengaskan tentu saja adalah cerai-berainya harmoni kehidupan dan lemahnya ketahanan masyarakat (*community resiliency*) terhadap provokasi yang mengarah pada perpecahan dan pertarungan antarsesama dengan bermacam dalih. Di luar persoalan besar kekerasan sebagaimana terjadi di Aceh, Ambon, Poso dan Papua, nyaris dalam keseharian warga bangsa dijejali informasi bentrok antarmassa yang terentang mulai dari Jakarta hingga ke pelosok daerah. Mulai dari elite politik, sosial, bahkan elite kultural hingga tingkat “akar rumput” seakan berlomba menjadi jagoan. Ditambah kusut masai kerumitan persoalan lain seperti betapa sulit memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme), kondisi keterpurukan ekonomi yang makin menghimpit, dan menipisnya kecerdasan emosional dan spiritual; maka lengkap sudah penderitaan bangsa ini.

Menghadapi problematika mahaberoat tersebut, sudah ratusan diskusi maupun seminar digelar, puluhan pertemuan diselenggarakan, bahkan ribuan manuskrip ditulis oleh berbagai kalangan yang menaruh kepedulian terhadap nasib bangsanya. Tapi sudah hampir lima tahun, masih sedikit tanda-tanda bahwa berbagai persoalan yang mendera bangsa ini bisa terselesaikan dengan baik dan berperadaban.

Spesifik mengenai pertikaian yang menjurus pada kekerasan antarsesama secara fisik, terdapat catatan menarik yang relevan diperhatikan. Jika pada era Orde Baru orang dewasa dirisaukan oleh maraknya perkelahian antarpelajar, maka pada era Orde Reformasi sebaliknya, para muda justru merisaukan tawuran antarorang dewasa. Tawuran antarkampung, antarkelompok organisasi massa, perang urat syaraf antarelite politik, bahkan adu jotos antaranggota lembaga tertinggi negara, (maaf) sungguh menjadi tontonan sangat menyedihkan.

Artikel berikut ini berusaha melacak dan mendeskripsikan satu perspektif yang relatif baru, yakni multikulturalisme, dan berusaha memaparkan peluang penerapannya dalam konteks Pendidikan Multikultural di Indonesia.

PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME

Sekurang-kurangnya ada tiga istilah yang selama ini seringkali digunakan guna menggambarkan masyarakat yang terdiri atas agama, ras, etnik, bahasa, dan budaya yang berbeda, yaitu pluralitas atau kemajemukan (*plurality*), keberagaman atau diversitas (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Secara substansial, ketiga terminologi tersebut pada prinsipnya tidak merepresentasikan hal yang sama kendati ketiganya mengacu kepada pengakuan adanya “ketidaktunggalan.” Konsep pluralitas mengandaikan adanya ‘hal-hal yang lebih dari satu’ (*many*); diversitas menunjukkan bahwa keberadaan yang ‘lebih dari satu’ itu berbeda-beda, heterogen, dan tidak bisa disamakan (Sirry, 2003), bahkan menurut penulis juga mendapat pengakuan.

Jika diperbandingkan dengan dua konsep terdahulu, multikulturalisme tergolong baru (Alexander, 2002). Pada masa Orde Baru dan sebelumnya, konsep pluralitas dan diversitas pengakuannya tercermin pada semboyan *bhinneka* (sungguhpun berbeda-beda), namun sesungguhnya satu (*tunggal ika*) atau “sungguhpun satu, namun sesungguhnya berbeda-bedalah itu” (lihat Wignjosoebroto, 2003). Tetapi sekali lagi, hal itu masih sebatas pengakuan (proeksistensi). Sedangkan inti perspektif multikulturalisme adalah kesediaan untuk menerima kelompok-kelompok lain secara sama sebagai satu kesatuan, tanpa mempedulikan agama, ras, etnik, jender, bahasa, dan kultur yang diwujudkan dalam perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (koeksistensi).

Jadi, secara konseptual dapat dikatakan bahwa apabila pluralitas dan diversitas sekadar merepresentasikan adanya pengakuan kemajemukan yang 'lebih dari satu', maka multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya, siapa pun sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme dengan demikian menjadi semacam respon kebijakan baru terhadap keberagaman. Dengan kalimat lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidaklah cukup, sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara (Sirry, 2003) dan siapa pun yang tertarik (*concern*) kepadanya.

Dalam hubungannya dengan sistem pendidikan, Nasikun (2003) menekankan betapa penting meletakkan daya ikat (imperatif) pendidikan multikultural bagi masyarakat majemuk. Menurut Ekstrand (1997) dalam Nasikun (2003), ada tiga perspektif multikulturalisme di dalam sistem pendidikan, yaitu: 1) perspektif *cultural assimilation*; 2) perspektif *cultural pluralism*; dan 3) perspektif *cultural synthesis*. Perspektif pertama merupakan suatu model transisi di dalam pendidikan yang menunjuk pada proses asimilasi anak atau subjek didik dari berbagai kebudayaan atau masyarakat sub-nasional ke dalam suatu *core culture* dan/atau *core society*. Perspektif kedua menekankan pada pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan masyarakat sub-nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kultural masing-masing. Perspektif ketiga merupakan sintesis dari perspektif asimilasionis dan pluralis, yang menekankan pentingnya proses terjadinya eklektisisme dan sistesis di dalam diri anak atau subjek didik dan masyarakat, serta terjadinya perubahan di dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat sub-nasional.

Sangat jelas, dalam konteks suatu sistem politik kesukuan (*ethnic politics*), proses politik memiliki kecenderungan kuat untuk memilih ujung-ujung ekstrem di antara polarisasi pilihan perspektif pendidikan *asimilasionis-pluralis* (Nasikun, 2003). Oleh karena tekanan yang kuat pada pergumulan integrasi nasional dan potensi konflik etnik yang dihadapi Indonesia di bawah pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, misalnya, sistem pendidikan nasional selama ini diselenggarakan dengan memberikan tempat sangat penting pada aplikasi perspektif pendidikan asimilasionis di atas argumen pentingnya pembentukan satu kebudayaan nasional yang kuat bagi pembangunan institusi-institusi koalisi dan *brokerage* multi-etnik yang sangat bagi proses integrasi nasional. Hal ini tercermin, misalnya, dalam berbagai dokumen GBHN maupun UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemberian tempat yang berlebihan pada fungsi pendidikan "integratif" melalui aplikasi perspektif asimilasionis itu, telah terbukti gagal menciptakan institusi-institusi koalisi dan *brokerage* sebagai bangunan yang kokoh bagi berkembangnya proses integrasi nasional. Sebaliknya, yang berhasil diciptakan tidaklah lebih dari suatu "bangunan semu" yang sangat rapuh bagi pengembangan proses integrasi nasional.

PENDIDIKAN MASA SILAM

Dipandang dari sudut ilmu sosial dan politik, siapa pun berhak percaya pada tesis Jack Snyder (2000) sebagaimana diungkapkannya dalam buku *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict* mengenai hubungan antara demokratisasi dan timbulnya pertikaian antarsesama alias konflik. Sebab hubungan tersebut secara empirik tercermin pada kenyataan bahwa hampir semua konflik yang penuh kekerasan selama dasawarsa 1990-an terjadi di negara yang baru mengalami kebebasan politik, perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan pers. Konflik dimaksud memuncak ketika gelombang transisi ke arah demokrasi juga memuncak. Bukanlah suatu kebetulan semata bahwa Indonesia juga sedang mengalami hal yang sama.

Namun begitu tidak bisa dinafikan juga bahwa dalam perjalanannya, hampir setiap bangsa mengalami *never ending development process* melalui tritmen pendidikannya. Baik itu pendidikan politik, pendidikan budaya, lebih-lebih politik pendidikannya. Dalam bahasa ilmu ekonomi, tritmen pendidikan itulah yang disebut-sebut sebagai investasi sumber daya manusia. Oleh karena itu, disadari atau tidak, diakui atau tidak, kondisi yang dialami bangsa Indonesia saat ini bukanlah semata-mata persis seperti disebut Snyder; lebih dari itu merupakan produk politik pendidikan masa lalu yang tidak bersenyawa dengan bidang kebudayaan dan politik terutama dalam visi dan perspektif serta kehidupan sejati bangsa ini. Implisit di dalamnya adalah kegagalan pendidikan membangun kesadaran sejarah dan kemampuan memandang segala persoalan secara dialektik sehingga bangsa ini tidak tahu dari mana harus berangkat menata masa depannya.

Jika benar demikian, maka solusi permanen yang paling masuk akal guna mengatasi kompleksitas problematika bangsa ini bukanlah terletak pada proses alamiah demokratisasi itu sendiri dengan segala dinamika dan rekayasanya, melainkan bagaimana menginvestasikan sumber daya manusia melalui pendidikan secara benar. Tapi penting dicatat, sebagaimana pernah disinggung seorang budayawan, investasi sumber daya manusia tidak bisa instan. Paling tidak dibutuhkan waktu satu generasi untuk berkorban sebelum bisa mengambil buahnya. Dengan kalimat lain, jika pendidikan orang dewasa sudah tidak bisa dijangkau, maka tumpuan harapan terletak pada pendidikan angkatan muda.

Persoalannya adalah, pendidikan bagaimanakah yang bisa menjadi solusi permanen sehingga membuahkan generasi yang bisa hidup sejahtera dan lebih memiliki prestise hidup, menghargai harmoni kemanusiaan dan kedamaian, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan kultural, dan tentu saja berjiwa demokratis? Salah satu jawabannya barangkali adalah pendidikan multikultural yang dalam setahun belakangan mengemuka sebagai wacana di kalangan intelektual Indonesia.

FASE-FASE PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Dalam berbagai risalah tercatat, konsep pendidikan multikultural bermula dari gerakan reformasi pendidikan di Amerika Serikat selama perjuangan hak-hak sipil kaum Amerika keturunan Afrika pada tahun 1960-an dan 1970-an. Perubahan kemasyarakatan yang mendasar seperti integrasi sekolah-sekolah negeri dan peningkatan populasi imigran telah memberikan dampak yang besar atas lembaga-lembaga pendidikan. Pada saat para pendidik berjuang untuk menjelaskan tingkat kegagalan dan putus sekolah peserta didik dari kelompok etnik marjinal, beberapa orang berpendapat bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan budaya yang memadai guna mencapai keberhasilan akademik. Tetapi bagaimana pun, banyak teoritis multikultural menunjuk kegagalan sekolah akibat ketidakmerataan institusi yang menciptakan rintangan sehingga justru memarjinalkan keberhasilan akademik kaum muda.

Banks (1994) dalam *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice* telah mendeskripsikan evolusi pendidikan multikultural dalam empat fase. *Pertama*, terjadinya upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnik pada setiap kurikulum. *Kedua*, hal itu diikuti oleh pendidikan multi-etnik sebagai suatu usaha guna menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. *Ketiga*, kelompok-kelompok marjinal yang lain seperti kaum perempuan, penyandang cacat, kaum homo dan lesbian, mulai menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. Perbedaan kebutuhan dan agenda berbagai kelompok ini menghasilkan banyak sekali fokus teoritis. Tapi bagaimana pun fase *keempat*, perkembangan teori, riset dan praktik yang perhatiannya tertuju pada hubungan antar-ras, kelamin dan kelas telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritis meskipun bukan pada praktisi pendidikan multikultural.

Gerakan reformasi itu mengupayakan transformasi proses pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkatan sehingga setiap peserta didik, apa pun ras dan etniknya, kecacatan, kelamin, kelas sosial (miskin dan nonmiskin) dan orientasi seksualnya akan menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan (misalnya lihat Alexander, 2002).

Nieto (1992) dalam *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education* menyatakan bahwa kebanyakan pengikut pendidikan multikultural setuju bahwa tujuan mereka adalah sebuah pendidikan yang bersifat antirasial yang memperhatikan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia; yang penting bagi setiap peserta didik; yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan; yang mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memungkinkan peserta didik bersama-sama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademik; dan menerapkan ilmu pendidikan kritis yang memberi perhatian pada bangunan pengetahuan sosial dan

membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan serta tindakan sosial.

Mereka juga memiliki pandangan yang sama terhadap sekolah sebagai sistem sosial dari komponen yang saling berhubungan seperti sikap dan tindakan pengajar, kebijakan dan politik sekolah, budaya dan kurikulum tersembunyi sekolah, gaya belajar siswa, prosedur penilaian dan pengujian, materi yang diajarkan, kurikulum pendidikan yang resmi, strategi dan gaya pengajaran, bahasa dan budaya sekolah, serta partisipasi komunitas. Melalui cara itu pendidikan multikultural berkembang melampaui reformasi kurikulum menjadi transformasi keseluruhan unsur dalam sistem (lihat Reich, 2002).

Berdasarkan diskursus tersebut, bukan berarti institusi-institusi pendidikan berciri khas seperti sekolah-sekolah berlabel agama harus dibubarkan, tetapi bagaimana memberi isi yang benar dalam proses pendidikannya sehingga tidak cenderung eksklusif, melainkan sebaliknya menjadi inklusif. Hal yang sama juga berlaku bagi institusi-institusi pendidikan publik maupun privat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dari mana hal itu harus dimulai? Tentu saja dari hulunya, yakni dasar pijakan hukum dan politik pendidikan yang memuat filsafat, visi dan perspektif pendidikan yang melampaui batas-batas kedaerahan dan nasional meskipun secara teknis dilaksanakan di daerah. Melelahkan memang. Tapi begitulah jalan panjang yang mesti dilalui agar Indonesia Baru di kelak kemudian hari bisa terwujud. Amerika Serikat saja membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun jembatan bagi terlaksananya multikulturalisme dalam konteks pendidikannya (Reich, 2002).

Gerakan reformasi Mei 1998 untuk mentransformasikan otoritarianisme Orde Baru menuju transisi demokrasi sebaliknya telah menyemaikan berkembangnya kesadaran baru tentang pentingnya otonomi masyarakat sipil (baca: kelompok etnik, agama, ras untuk menyebut di antara yang paling penting), dan telah menjadi dasar bagi pilihan perspektif pada ujung ekstrem yang lain yang oleh Ekstrand disebut sebagai perspektif *radical multiculturalism* (multikulturalisme radikal).

Di dalam konteks perkembangan sistem politik Indonesia saat ini, pilihan perspektif pendidikan yang demikian memiliki peluang akan semakin menguatkan ketidakmampuan kita untuk membangun institusi-institusi koalisi dan *brokerage* multi-etnik yang diperlukan sebagai landasan bagi pengembangan suatu sistem politik rasional. Sebagaimana sudah disebutkan di muka, perspektif pendidikan pluralis sangat menekankan pentingnya akomodasi hak setiap kebudayaan dan masyarakat sub-nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kebudayaan dan masyarakat nasional.

Menurut Nasikun (2003), yang diperlukan sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan sistem demokrasi di dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini adalah aplikasi pilihan perspektif pendidikan "sintesis multikultural"

ketiga, yang merupakan sintesis dari aplikasi perspektif asimilasionis dan pluralis. Perspektif pendidikan ini memberikan peran pada pendidikan multikultural sebagai instrumen bagi pengembangan eklektisisme dan sintesis beragam kebudayaan sub-nasional pada tingkat individual dan masyarakat dan promosi terbentuknya suatu *melting pot* dari beragam kebudayaan dan masyarakat sub-nasional.

Pilihan perspektif pendidikan *sintesis multikultural* memiliki rasionalnya yang paling dasar di dalam hakikat tujuan suatu pendidikan multikultural, yang dapat diidentifikasi meliputi tiga tujuan berikut (Ekstrand, 1997 dalam Nasikun, 2003): tujuan *attitudinal*; tujuan *kognitif*; dan tujuan *instruksional*. Pada tingkat *attitudinal*, pendidikan multikultural memiliki fungsi untuk menyemaikan dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan pada identitas kultural, pengembangan sikap *culture responsive*, dan keahlian dalam penolakan dan resolusi konflik. Pada tingkat kognitif, pendidikan multikultural memiliki tujuan bagi pencapaian kemampuan akademik, pengetahuan tentang kemajemukan kebudayaan, kompetensi untuk melakukan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan memiliki kesadaran kritis tentang kebudayaan sendiri. Pada tingkat instruksional, pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan melakukan koreksi atas distorsi-distorsi, stereotipe-stereotipe, peniadaan-peniadaan, dan misinformasi tentang kelompok-kelompok etnik yang dimuat di dalam buku-buku dan media-media pembelajaran; menyediakan strategi-strategi untuk melakukan hidup dalam pergaulan multikultural, menyediakan perangkat-perangkat konseptual untuk komunikasi multikultural, mengembangkan keterampilan-keterampilan komunikasi interpersonal, menyediakan teknik-teknik untuk melakukan evaluasi, dan membantu menyediakan klarifikasi dan penjelasan-penjelasan tentang dinamika-dinamika perkembangan kebudayaan.

Secara konseptual agak sulit memang meletakkan fondasi pendidikan multikultural dalam posisi sebagai *hard-ware* sistem pendidikan nasional di Indonesia. Namun langkah awal bisa dimulai dengan meletakkan muatan multikulturalisme dalam proses pembelajaran, hampir di semua bidang. Guru Matematika misalnya, perlu menegaskan bahwa lambang bilangan 2, 5 dan 9 itu memang berbeda, sama dengan perbedaan agama, jender dan bahasa setiap warga negara. Tapi, jika lambang bilangan berbeda itu saling bersatu membentuk satu kesatuan angka, misalnya 592 atau 952, maka kekuatan dan maknanya menjadi lebih besar dan luar biasa, yakni lima ratus sembilan puluh dua dan sembilan ratus lima puluh dua.

Guru Biologi barangkali perlu menegaskan bahwa keberagaman bukan hanya menjadi milik berbagai ordo makhluk, tetapi hal itu sudah dimulai dari diri sendiri. Setiap manusia bukan hanya berbeda secara genetik dan sidik jarinya, setiap organ tubuh saja sudah berbeda fungsi dan bentuknya. Perbedaan itu menjadi bermakna ketika berada dalam satu harmoni aktivitasnya. Tangan dan kaki tak dapat leluasa

menjalankan fungsinya jika mata dan telinga tidak membantunya. Demikian seterusnya.

Bagaimana dengan kajian sosial (*social studies*) dan atau pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial? Guru yang menekuni bidang ini tentu saja menjadi lebih leluasa memasukkan muatan multikulturalisme dalam setiap proses pembelajarannya. Namun fakta menunjukkan, pendidikan IPS, sebagaimana juga tercermin dalam skop dan sequen mata ajarnya, belum mencerminkan perspektif multikulturalisme, apalagi praktik pembelajarannya (lihat misalnya Mulder, 1997 dan 2000). Karena itulah diperlukan analisis dan kajian lebih lanjut secara komprehensif agar *social studies* yang termasuk di dalamnya adalah Pendidikan Kewargaan Negara dan Pendidikan IPS benar-benar menjadi pioner bagi terwujudnya praktik pendidikan multikultural di Indonesia.

KESIMPULAN

Multikulturalisme sebagai paham keberagaman yang cenderung humanitairian relatif baru di Indonesia. Demi menghindari meluasnya disintegrasi bangsa, dalam jangka panjang perlu dipertimbangkan tritmen multikulturalisme melalui berbagai wahana, termasuk pendidikan multikultural. dengan basis tekanan pada kaum muda. Peluang penerapannya pada prinsipnya relatif terbuka, meskipun perlu dimulai dari proses pembelajaran di semua bidang studi. Pada konteks sistem pendidikan, kendati terdapat tiga perspektif multikulturalisme, yakni perspektif *cultural assimilation*; perspektif *cultural pluralism*; dan perspektif *cultural synthesis*, agaknya perspektif yang terakhirlah yang paling relevan diterapkan jika dikaitkan dengan kondisi kekinian dan pengalaman sejarah kebangsaan Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Alexander, N. A. 2002. "Race, Poverty, and the Student Curriculum: Implications for Standards Policy." *American Educational Research Journal*, Vol. 32, No. 3. Pp. 675-693.
- Banks, J. 1994. *An Introduction to Multicultural Education*. Needham Heights, MA.
- Mulder, N. 2000. *Indonesian Images: The Culture of the Public World*. Yogyakarta: Kanisius Publishing House.
- Mulder, N. 1997. *Individual, Society and History According to Indonesian School Texts*. Amsterdam: The Pepin Press.
- Nasikun, J. 2003. "Imperatif Pendidikan Multikultural bagi Masyarakat Majemuk." *Makalah.. Diskusi Terbatas tentang RUU-Sisdiknas dalam Perspektif Multikulturalisme*. Yogyakarta: Institut Pengembangan Demokrasi dan HAM (Inpedham).

- Nieto, S. 1992. *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York.
- Reich, R. 2002. *Bridging Liberalism and Multiculturalism in American Education*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Sirry, M. 2003. "Agama, Demokrasi, dan Multikulturalisme." *Kompas*, 1 Mei. Hlm. 4-5.
- Snyder, J. 2000. *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
- Wignjosoebroto, S. 2003. "Dilema Nasionalisme Pada Peralihan Ke Abad XXI: Masalah Etnisitas dan Etno-Nasionalisme dalam Kehidupan Berbangsa." *Makalah*. Seminar Nasional "Menata dan Membangun Keutuhan Bangsa Melalui Pendekatan Kultural", 6 Mei. Yogyakarta: Institut Pengembangan Demokrasi dan HAM (Inpedham).